

Pelatihan dan Pendampingan Kader Desa dalam Asesmen Potensi Kelembagaan Sosial di Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Mohammad Suud¹, Sugeng Pujileksono², Heru Dwi Herbowo³, Yudi Harianto Cipta Utama⁴, Chirestine Lucia Mamuya⁵, Jessy Justin Nasrani⁶, Wardatuz Zahra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Article Info

Article history:

Article history:

Received July 2, 2026

Revised July 11, 2026

Accepted July 27, 2026

Kata kunci:

Pelatihan dan pendampingan

Kader desa

Asesmen potensi

Kelembagaan sosial

ABSTRAK

Ketiadaan pemetaan potensi kelembagaan sosial secara mandiri di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, menyebabkan potensi lokal yang dimiliki oleh organisasi sosial kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Majelis Taklim belum termanfaatkan secara optimal sebagai rujukan penanganan masalah sosial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader desa dalam melakukan asesmen potensi kelembagaan sosial melalui pelatihan dan pendampingan. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan (penggalan kebutuhan pelatihan, penetapan materi dan peserta), tahap pelaksanaan (tes awal, pelatihan, jalan transek, curah pendapat, pendampingan penyusunan peta, tes akhir), dan tahap evaluasi. Kegiatan diikuti oleh 20 kader desa yang mewakili empat organisasi sosial kemasyarakatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kader mengenai konsep dan teknik asesmen potensi kelembagaan sosial, serta tersusunnya peta potensi kelembagaan sosial Desa Wonokerto yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial di tingkat desa.

Keywords:

Training and mentoring

Village cadres

Potential assessment

Social institutions

ABSTRACT

The absence of an independent mapping of social institutional potential in Wonokerto Village, Sukorejo Sub-district, Pasuruan Regency, has caused local potential owned by community social organizations such as PKK, Karang Taruna, Posyandu, and Majelis Taklim to remain underutilized as a reference for handling social problems. This community service activity aims to strengthen the capacity of village cadres to assess social institutional potential through training and mentoring. The method consisted of a preparation stage (identifying training needs, determining materials and participants), an implementation stage (pre-test, training, transect walk, brainstorming, mentoring in map preparation, post-test), and an evaluation stage. The activity involved 20 village cadres representing four community social organizations. The results show an improvement in cadres' understanding of the concept and technique of assessing social institutional potential, and the production of a social institutional potential map of Wonokerto Village that can serve as a reference for village development planning and social services.



Corresponding Author:

Heru Dwi Herbowo

Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: heru_fisip@uwks.ac.id**Pendahuluan**

Perbedaan mendasar antara pembangunan dari atas ke bawah (model pertumbuhan ekonomi) dengan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (pembangunan manusia) terletak pada empat hal, yaitu: akses terhadap informasi bagi seluruh kelompok dalam populasi termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin pedesaan maupun perkotaan; informasi sebagai alat dan akses untuk membangun kemandirian, pemberdayaan, masyarakat sipil, partisipasi, dan kesetaraan gender; pengetahuan asli atau tradisional dan informasi yang dihasilkan secara lokal yang diberi status tinggi; serta saluran komunikasi tradisional yang dihormati dan tidak dianggap sebagai penghalang pembangunan (Mchombu et al., 2004). Kunci keberhasilan pembangunan yang berpusat pada masyarakat adalah terciptanya akses terhadap informasi yang dinilai secara kritis untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perekonomian, pertanian, masalah sosial, hingga hak asasi manusia.

Namun dalam praktiknya, pembangunan yang berpusat pada masyarakat masih sulit ditemukan di tingkat desa. Kecenderungan pembangunan desa masih bernuansa dari atas ke bawah, sehingga pemahaman terhadap potensi kelembagaan sosial di masing-masing desa cenderung diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Padahal, pengetahuan masyarakat tentang kondisi dan potensi sosial di lingkungannya sendiri merupakan pengetahuan informal yang sangat berharga sebagai dasar perencanaan pembangunan partisipatif (Rosyadi, 2014). Selama ini, pendataan masalah dan potensi sosial di desa lebih banyak mengikuti format baku dari kementerian atau dinas terkait, sehingga pemaknaan lokal atas potensi kelembagaan sosial sering kali terabaikan dan hanya tersaji dalam bentuk angka-angka tabulasi yang seragam.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, di mana papan monografi desa tentang potensi kelembagaan sosial belum terisi secara memadai. Di desa ini terdapat sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Majelis Taklim, yang selama ini berkontribusi dengan waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya bagi pembangunan di tingkat lokal. Sayangnya, potensi yang dimiliki keempat kelembagaan sosial tersebut belum pernah dipetakan secara sistematis oleh kadernya sendiri sehingga sulit dijadikan rujukan yang komprehensif dalam perencanaan program maupun penanganan masalah sosial warga.

Di sinilah pentingnya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader desa agar mampu melakukan asesmen dan memetakan pengetahuan masyarakat tentang potensi kelembagaan sosial di desanya. Pelibatan kader desa dalam pemetaan ini merupakan bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan masyarakat, yang menurut De Beer dan Swanepoel (2011) memiliki fungsi-fungsi khusus, yaitu mengidentifikasi dan memutakhirkan data berbagai kelompok dalam masyarakat, melakukan asesmen kebutuhan masyarakat, melakukan survei



komunitas dan menyusun profil, membantu mobilisasi sumber daya untuk intervensi pengembangan masyarakat, serta memobilisasi anggota masyarakat untuk kerja komunal dan proyek swadaya. Pendekatan berbasis partisipasi ini juga sejalan dengan pergeseran paradigma kesejahteraan sosial dari model berbasis bantuan menuju model berbasis hak dan partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana ditegaskan Herbowo (2025) bahwa pendekatan berbasis bantuan semata cenderung bersifat jangka pendek, tidak menyentuh akar masalah, dan menciptakan ketergantungan, sehingga penguatan partisipasi dan kapasitas subjek dampingan menjadi kunci keberlanjutan program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader desa dalam melakukan asesmen potensi kelembagaan sosial; dan (2) mendampingi kader desa dalam menyusun peta potensi kelembagaan sosial Desa Wonokerto yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi anggota masyarakat maupun Pemerintah Desa dalam merencanakan program pembangunan dan pelayanan sosial.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan sasaran kader desa yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu kader PKK, pengurus Karang Taruna, kader Posyandu, dan pengurus Majelis Taklim. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap persiapan meliputi penggalian informasi kebutuhan pelatihan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Wonokerto, penetapan materi dan peserta pelatihan, serta penyiapan materi dan alat pendukung pelatihan. Tahap pelaksanaan meliputi tes awal untuk mengukur pemahaman awal peserta, pemberian materi pelatihan, praktik asesmen lapangan, dan pendampingan penyusunan peta potensi kelembagaan sosial, yang diakhiri dengan tes akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Tahap evaluasi meliputi kegiatan evaluasi keseluruhan program serta penyusunan laporan kegiatan.

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri atas tiga metode utama. Pertama, jalan transek (transect walk), yaitu penelusuran jalan desa, dukuh, dan perkampungan Desa Wonokerto yang didampingi oleh kader desa yang memahami kondisi sosio-kultural setempat. Jalan transek bertujuan mengetahui secara langsung sebaran dan kondisi kelembagaan sosial desa, yang hasilnya dijadikan bahan penyusunan peta potensi kelembagaan sosial. Kedua, curah pendapat (brainstorming), yang dilakukan secara formal maupun informal bersama kader desa untuk mengidentifikasi usulan, isu, permasalahan, dan potensi desa yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, pelatihan dan pendampingan, yang melibatkan kader desa sebagai peserta pelatihan sekaligus subjek yang didampingi dalam menyusun peta potensi kelembagaan sosial Desa Wonokerto.

Ketiga metode tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat, dalam hal ini kader desa, adalah pihak yang paling memahami kondisi diri dan lingkungannya (Kartawinata, 2009). Pelibatan aktif kader desa dalam proses asesmen sejalan dengan prinsip pengembangan

masyarakat yang menempatkan warga bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang berdaya (Adi, 2013; Soetomo, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sejak Februari hingga November 2023 di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan melibatkan tim pengabdi yang terdiri atas dua dosen dan dua mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kegiatan diikuti oleh 20 orang kader desa yang mewakili empat organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu kader PKK, pengurus Karang Taruna, kader Posyandu, dan pengurus Majelis Taklim, atas dukungan penuh dari Kepala Desa Wonokerto beserta perangkat desa.

Pada tahap persiapan, tim pengabdi melakukan survei awal dan koordinasi dengan Kepala Desa Wonokerto untuk menggali kebutuhan pelatihan serta menetapkan sasaran dan materi pelatihan. Hasil survei menunjukkan bahwa papan monografi desa belum memuat data potensi kelembagaan sosial secara memadai, dan kader desa belum pernah memperoleh pelatihan mengenai asesmen maupun pemetaan potensi kelembagaan sosial, meskipun sebagian dari mereka pernah mengikuti penyuluhan umum dari dinas maupun perguruan tinggi terkait topik lain. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang difokuskan pada konsep dasar asesmen dan pemetaan sosial.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan tes awal untuk mengukur pemahaman peserta mengenai konsep kelembagaan sosial dan pemetaan sosial. Selanjutnya, tim pengabdi memberikan materi pelatihan mengenai pengertian pemetaan sosial, tujuan dan manfaat asesmen potensi kelembagaan sosial, serta teknik penelusuran dan pencatatan data lapangan. Materi disampaikan secara komunikatif dengan melibatkan diskusi interaktif dan tanya jawab, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sebagai pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di desa.



Gambar 1.Penyampaian materi dengan warga Desa Wonokerto

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik jalan transek (transect walk) yang dilakukan bersama kader desa untuk menelusuri jalan, dukuh, dan perkampungan Desa Wonokerto. Kegiatan ini didampingi langsung oleh tim pengabdian dan kader desa yang memahami kondisi sosio-kultural setempat, sehingga peserta dapat mengamati secara langsung sebaran kegiatan PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Majelis Taklim di masing-masing dukuh. Hasil pengamatan lapangan tersebut kemudian didiskusikan melalui sesi curah pendapat (brainstorming) untuk mengidentifikasi isu, kebutuhan, dan potensi pengembangan masing-masing kelembagaan sosial.

Tabel 1.

Peta Potensi Kelembagaan Sosial Desa Wonokerto Hasil Asesmen Kader Desa

Kelembagaan Sosial	Fokus Kegiatan	Potensi yang Teridentifikasi	Kebutuhan Pengembangan
PKK	Kesejahteraan keluarga & perempuan	Kelompok usaha rumahan, kader posyandu, pelatihan keterampilan warga	Penguatan administrasi & jejaring pemasaran
Karang Taruna	Kepemudaan	Jejaring pemuda aktif, potensi kegiatan sosial-olahraga	Regenerasi kepemimpinan & pelatihan kewirausahaan
Posyandu	Kesehatan ibu, bayi, dan anak	Kader terlatih, jadwal layanan rutin bulanan	Penguatan pencatatan data & rujukan layanan
Majelis Taklim (Yasinan & Manakib)	Sosial-keagamaan	Jaringan sosial berbasis keagamaan yang luas dan rutin	Sinergi dengan program sosial desa

Sumber: Hasil pemetaan bersama kader desa, 2023

Berdasarkan hasil jalan transek dan curah pendapat pada tabel di atas, kader desa selanjutnya didampingi oleh tim pengabdian untuk menyusun peta potensi kelembagaan sosial Desa Wonokerto dalam bentuk visualisasi sederhana yang memuat sebaran dan fokus kegiatan masing-masing kelembagaan sosial di setiap dukuh. Proses pendampingan ini dilakukan secara bertahap, dari pengumpulan data lapangan, verifikasi bersama pengurus kelembagaan terkait, hingga penyusunan draf peta akhir yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonokerto sebagai salah satu bahan rujukan perencanaan desa.

Hasil tes akhir menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dibandingkan hasil tes awal, khususnya pada aspek pengertian asesmen potensi kelembagaan sosial, teknik jalan transek, dan cara menyusun peta potensi sosial secara sederhana. Peserta juga menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman baru karena selama ini mereka belum pernah

dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan potensi desa, melainkan hanya sebagai pelaksana kegiatan rutin organisasi masing-masing.

Dari sisi evaluasi, kegiatan pengabdian ini secara umum berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari kader desa maupun Pemerintah Desa Wonokerto. Beberapa kendala yang dihadapi bersifat teknis, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan jalan transek akibat jadwal kegiatan kader yang padat, serta perbedaan tingkat literasi digital antarpeserta dalam menyusun peta secara tertulis. Kendala tersebut diatasi dengan pendampingan intensif secara berkelompok dan penyederhanaan format pencatatan data lapangan.

Hasil kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa pengetahuan informal masyarakat tentang potensi sosial di lingkungannya merupakan sumber daya penting yang selama ini kurang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan desa (Rosyadi, 2014; Rudito & Famiola, 2008). Pelibatan kader desa sebagai subjek asesmen, bukan sekadar objek penyuluhan, sejalan dengan lima fungsi pengembangan masyarakat yang dikemukakan De Beer dan Swanepoel (2011), khususnya pada aspek identifikasi dan pemutakhiran data kelompok masyarakat serta penyusunan profil komunitas. Peran tim pengabdi dalam kegiatan ini juga sejalan dengan peran fasilitator sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem layanan, sebagaimana ditegaskan Mamuaya dan Herbowo (2026) dalam konteks pekerja sosial yang menjembatani kebutuhan warga dengan sistem pelayanan yang lebih luas melalui dukungan psikososial dan penguatan kapasitas.

Selain itu, model kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang diterapkan dalam kegiatan ini, yang melibatkan kader desa, Pemerintah Desa, dan mahasiswa, sejalan dengan model kolaborasi partisipatif yang dikembangkan oleh Putri, Herbowo, dkk. (2024) dalam program KoGuRuPa, yang menunjukkan bahwa sinergi antar-pemangku kepentingan lokal mampu memperkuat efektivitas program pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan demikian, peta potensi kelembagaan sosial yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi instrumen hidup yang terus dimutakhirkan oleh kader desa dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial yang partisipatif di Desa Wonokerto.

Kesimpulan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan kader desa tentang asesmen potensi kelembagaan sosial di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 20 kader desa dari unsur PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Majelis Taklim dalam melakukan asesmen potensi kelembagaan sosial. Melalui metode jalan transek, curah pendapat, serta pelatihan dan pendampingan, kader desa berhasil menyusun peta potensi kelembagaan sosial Desa Wonokerto yang memuat sebaran, fokus kegiatan, dan kebutuhan pengembangan masing-masing kelembagaan sosial. Peta ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat dalam merencanakan program pembangunan dan penanganan masalah sosial secara lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Wonokerto secara berkala memutakhirkan peta potensi kelembagaan sosial yang telah disusun, melibatkan lebih banyak kader dari



kelembagaan sosial lain yang belum terlibat, serta menjadikan kegiatan asesmen partisipatif ini sebagai agenda rutin dalam perencanaan pembangunan desa. Perguruan tinggi dan pihak terkait juga disarankan untuk mereplikasi model pelatihan dan pendampingan serupa di desa-desa lain guna memperkuat basis data potensi kelembagaan sosial di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas dukungan pendanaan internal perguruan tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Wonokerto, Bapak Sugiono, S.Pd., beserta perangkat desa, serta seluruh kader PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Majelis Taklim Desa Wonokerto yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Referensi

- Adi, I. R. (2013). Intervensi komunitas & pengembangan masyarakat: Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Rajawali Pers.
- Chun-Chung Chow, J., & Peng, C. (2015). Community-needs assessment. Oxford Bibliographies.
- De Beer, F., & Swanepoel, H. (2011). Community development: Breaking the cycle of poverty. National Book Printers.
- Herbowo, H. D. (2025). Rekonseptualisasi kesejahteraan anak dalam konteks kebijakan sosial: Antara pendekatan kesejahteraan, hak anak, dan partisipasi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 353–371. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>
- Kartawinata, A. M. (2009). Keberadaan komunitas adat di tengah arus globalisasi [Makalah]. Workshop dan Festival Komunitas Adat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata – Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Mamuaya, C. L., Herbowo, H. D., Utama, Y. H. C., Athira, F. N., & Assegaf, Z. N. (2026). Pekerja sosial medis dalam meningkatkan kualitas kesehatan pasien: Peran, tantangan, dan implikasi kebijakan dalam sistem pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 108–118. <https://doi.org/10.30742/juisspol.v6i1.5295>
- Mchombu, K. J., Evans, G., Bruton, K., & Cocks, A. (2004). Sharing knowledge for community development and transformation: A handbook. CIDA. <https://doi.org/10.13140/2.1.3228.5124>
- Putri, R. Y., Herbowo, H. D., Musrifah, S., Choiriyah, S. S., Purwati, E., Halizah, C. N., Mufidah, A. T., & Siva, B. R. B. C. (2024). KoGuRuPa: Kolaborasi guru, orang tua dan pengasuh untuk mewujudkan Kota Surabaya layak anak. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v8i2.3476>
- Rosyadi. (2014). Sistem pengetahuan lokal masyarakat Cidaun Cianjur Selatan sebagai wujud adaptasi budaya. *Jurnal Patanjala*, 6(3), 397–410.

Rudito, B., & Famiola, M. (2008). Social mapping: Teknik memahami suatu masyarakat atau komuniti. Rekayasa Sains.

Soetomo. (2013). Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah muncul antitesisnya?. Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama.

Suparlan, P. (2005). Suku bangsa dan hubungan antar sukubangsa. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.